

## RINGKASAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TANPA IZIN**

SUHERMAN,

PEMBIMBING (I) M. ZAINUDDIN,

PEMBIMBING (II) MUH. SALEH.

Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini manusia berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, demi untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Hal itulah yang memacu para pelaku usaha/produsen yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan dalam jumlah yang besar.

Pesatnya industri pengolahan makanan dan minuman, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan terhadap konsumen, karena tidak menutup kemungkinan produk yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan, disamping itu juga banyak ditemukan produk olahan yang tidak memiliki izin produksi (SP-IRT).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen atas barang dagangannya yang tidak memiliki izin, dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin.

Data-data yang tertuang dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder disamping bahan pustaka yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan kepada para produsen maupun masyarakat konsumen sebagai pengguna akhir barang dan atau jasa, sehingga dapat memperjuangkan hak-haknya apabila merasa dirugikan, disamping itu juga para produsen akan mengetahui apa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dihadapi apabila barang atau produk yang dihasilkan tidak memiliki registrasi/Izin dari pemerintah, serta dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki registrasi/izin.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Konsumen.*